

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian dimasa mendatang masih memegang peran strategis sebagai penghela pembangunan ekonomi nasional, karena memberikan kontribusi nyata bagi 237 juta penduduk Indonesia dalam penyediaan bahan baku industri, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penghasil devisa negara melalui ekspor, penyedia lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pengembangan ekonomi berbasis pertanian yang berorientasi pada konsep “*agro-based sustainable development*” perlu terus ditingkatkan karena hal ini diyakini dapat memperkokoh perekonomian bangsa Indonesia dengan basis pembangunan perdesaan. (Kementerian Pertanian, 2011).

Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa selama periode 2005-2010 sektor pertanian telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat. Keberhasilan sektor pertanian seharusnya diikuti oleh perkembangan sektor industri pengolahan yang mengolah produk pertanian menjadi produk setengah jadi dan barang jadi, agar terjadi nilai tambah (RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015).

Pembangunan ekonomi daerah dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional berarti menjadikan perekonomian daerah sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kegiatan pembangunan yang selama ini terjadi bersifat sentralistis (*top-down*) membawa akibat terjadinya disparitas ekonomi yang

sangat mengkhawatirkan bagi bangsa dan negara kita. Pada masa lalu, kebijakan pembangunan yang *top-down*, dimana pemerintah pusat cenderung terlalu banyak turut campur tangan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah.

Kerangka pembangunan ekonomi daerah, desentralisasi ekonomi bukan sekedar pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Syahrani (2001), paling tidak harus diterjemahkan dalam tiga aspek perubahan penting, yaitu: (1) “Pendaerahan” pengelolaan pembangunan ekonomi (perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasi) yang sebelumnya lebih didominasi pemerintah pusat dialihkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk berkreasi dan mengambil inisiatif dalam pembangunan ekonomi di daerahnya masing-masing. (2) Swastanisasi pelaksanaan pembangunan ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang sebenarnya dapat ditangani secara lebih efisien oleh swasta atau rakyat, baik secara individu maupun melalui badan usaha. (3) Organisasi dan kelembagaan pembangunan ekonomi juga harus mengalami perubahan. Di masa lalu, agar berhasilnya kebijakan pembangunan yang *top down*, pemerintah sering membentuk organisasi dan kelembagaan baru (yang oleh pemerintah dianggap modern) dan meminggirkan organisasi dan kelembagaan lokal. Dengan ketiga perubahan tersebut diharapkan perekonomian daerah akan digerakkan oleh kreativitas rakyat beserta kelembagaan lokal sedemikain rupa, sehingga potensi ekonomi yang terdapat di setiap daerah dapat dimanfaatkan demi kemajuan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Sektor pertanian di pedesaan jika ditangani secara serius, sesungguhnya dapat menjadi strategi untuk *recovery* sekaligus tulang punggung (*back bone*) bagi perkembangan sektor riil dari krisis ekonomi yang dialami Indonesia semenjak pertengahan tahun 1997. Hal ini terbukti oleh daya hidupnya yang tinggi, ketika sektor lain ambruk sektor pertanian masih bertahan. Sektor pertanian memiliki beberapa ciri khas seperti: terlibatnya banyak orang dengan pemilikan sumber daya, keterampilan dan pengetahuan yang masih rendah, serta jaringan sosial (*social network*) yang kurang mendukung khususnya untuk memasuki era ekonomi modern pada saat ini. Salah satu upaya pengembangan *social network* dapat dilakukan melalui pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat di pedesaan (Elizabeth, 2004).

Kawasan agropolitan merupakan salah satu konsep pengembangan wilayah yang dicetuskan pertama kali oleh Friedmann tahun 1973. Konsep agropolitan merupakan suatu konsep pengembangan wilayah di pedesaan. Aspek pengkajian pengembangannya merupakan satu kesatuan antara aspek ekonomi pertanian kawasan pedesaan dengan tata ruang, lokasi dan persoalan-persoalan kebijakan dan perencanaan pengembangan wilayah dalam lingkup yang lebih general (Syahrani, 2001)

Munculnya ide konsep kawasan agropolitan ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena rendahnya tingkat pertumbuhan pedesaan sebagai akibat dari mengalirnya sumber daya-sumber daya alam, manusia dan modal ke wilayah inti (perkotaan). Pengaruh informasi (peningkatan dalam interaksi potensial untuk menunjang pembangunan inovatif), pengaruh psikologis (penciptaan kondisi yang

menggairahkan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan inovatif secara lebih nyata), pengaruh mata rantai (kecenderungan inovasi melahirkan inovasi baru lainnya), serta adanya pengaruh produksi yaitu penciptaan struktur balas jasa yang menarik untuk kegiatan-kegiatan inovatif.

Program pengembangan kawasan agropolitan adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian di kawasan agribisnis. Program ini dirancang dan dilaksanakan dengan cara mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang di gerakan oleh masyarakat dan di fasilitasi oleh pemerintah. Pengembangan Agropolitan tidak berarti mengubah pedesaan menjadi perkotaan. Tujuan utamanya yaitu bagaimana potensi desa dapat dikembangkan melalui peningkatan kemampuan dan peran aktif masyarakat dengan fasilitasi pemerintah yang konsisten dalam mengelola sumber daya pertanian secara arif untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan agropolitan merupakan gerakan masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis pertanian dipedesaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat, 2009).

Berdasarkan hasil laporan koordinasi pengelolaan program pengembangan kawasan agropolitan dan primatani di Sumatera Barat oleh Bappeda Sumbar tahun 2009, Departemen Pertanian RI menetapkan 61 kawasan pengembangan kawasan agropolitan di beberapa Propinsi di Indonesia. Di Propinsi Sumatera Barat kegiatan ini dilaksanakan di 6 kabupaten yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Lima

Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Solok telah dimulai sejak tahun 2004, dengan dikeluarkannya SK Bupati Solok Nomor 42/BUP-2004 tanggal 21 Februari 2004 tentang penetapan kawasan agropolitan dan *hinterland* agropolitan Kabupaten Solok. Komoditi utamanya adalah tanaman hortikultura yaitu tanaman kentang, bawang merah, kubis, cabe, tomat dan markisa serta peternakan sapi sebagai komoditi penunjang. Daerah kawasan agropolitan yang dipilih adalah Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Danau Kembar. Sedangkan daerah *hinterland*nya terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yang ada disekitar yaitu Kecamatan Lembang Jaya, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Pantai Cermin dan Kecamatan Bukit Sundi.

Hasil pra penelitian dan studi literatur yang telah dilakukan, kondisi yang terjadi saat ini adalah program pengembangan kawasan agropolitan tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Implementasi agropolitan di Kabupaten Solok masih dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti masih lemahnya sosialisasi program sehingga banyak masyarakat di kawasan agropolitan yang kurang dan tidak mengetahui sama sekali tentang agropolitan, kurangnya koordinasi antara dinas/instansi terkait dan terkesan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berjalan sendiri-sendiri, masih lemahnya akses petani terhadap sumber pemodalan dan pasar, belum lengkapnya sarana prasarana pendukung, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pertanian yang ramah lingkungan,

kurangnya kesadaran petani untuk bergabung dalam kelompok dan tidak stabilnya harga jual komoditi sayuran di kawasan agropolitan.

Berlatar belakang dari permasalahan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Solok, maka penulis ingin meneliti tentang implementasi pengembangan kawasan agropolitan dalam bentuk penelitian ilmiah. Agar memudahkan dan lebih fokusnya penelitian ini membatasi daerah penelitiannya di Kecamatan Lembah Gumanti.

Alasan penetapan lokasi ini, karena Kecamatan Lembah gumanti merupakan daerah sentral pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Solok. Dalam pelaksanaan kegiatan 2004-2009, kawasan agropolitan Lembah Gumanti telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan agribisnis maupun sarana pelayanan umum (Bappeda Sumbar, 2009).

1.2 Perumusan Masalah

Program pengembangan kawasan agropolitan yang diadopsi dari konsep pengembangan wilayah dengan pengembangan kawasan agropolitan oleh Friedmann tahun 1970an, merupakan suatu program yang dikembangkan dengan tujuan agar terjadinya efisiensi. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat, melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terpusat di kawasan agropolitan (Bappeda Sumbar, 2006).

Realita di lapangan diketahui, kawasan agropolitan yang telah ada saat ini tidak berkembang atau belum berfungsi seperti yang diharapkan. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait, didalam mempercepat proses pengembangan kawasan agropolitan ternyata masih belum mampu memberikan hasil yang optimal. Pembangunan fisik (sistem infrastruktur) pada kawasan secara umum tidak berfungsi. Sehingga sasaran utama yang ingin dicapai dalam pengembangan kawasan agropolitan tersebut tidak tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengembangan kawasan agropolitan, dengan judul penelitian **“Kajian Implementasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Solok (Studi Kasus Kecamatan Lembah Gumanti)”**, untuk mengetahui bagaimana implementasi pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Solok, maka peneliti menfokuskan pengkajian dengan perumusan masalah penelitiannya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan belum berhasilnya implementasi pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum berhasilnya implementasi pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, baik secara akademik maupun praktis.

1.4.1 Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian-penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan pengembangan kawasan agropolitan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, berupa saran dan masukan yang positif kepada Pemerintah terutama bagi pembuat dan pelaksana kebijakan dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan pengembangan kawasan agropolitan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat mendukung kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.